



Perbandingan Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan di Indonesia dan Malaysia

Mendra Wijaya^{1*}, Noorjima Binti Abd Wahab², Panca Setyo Prihatin³

^{1,3} Universitas Islam Riau, Indonesia

² Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia

*Corresponding author: mendrawijaya@soc.uir.ac.id

Received 12-02-2025

Revised 27-02-2025

Published 10-03-2025

ABSTRAK

Pengelolaan perumahan dan permukiman perdesaan merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, seperti Malaysia dan Indonesia. Kebijakan yang diterapkan di masing-masing negara mencerminkan pendekatan yang berbeda. Malaysia mengandalkan model top-down yang terstruktur, sedangkan Indonesia mengadopsi pendekatan partisipatif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan Universitas Islam Riau dan Universiti Sultan Zainal Abidin dalam berbagi pengetahuan serta menganalisis kontribusi perguruan tinggi terhadap kebijakan perumahan dan permukiman di perdesaan. Diskusi dan perbandingan pengalaman menunjukkan kesamaan dalam penataan kawasan, terutama terkait penggunaan dan fungsi lahan. Perbedaannya, Malaysia lebih konsisten dalam membangun dan mengembangkan masyarakat desa, sehingga lebih berdaya. Sementara itu, Indonesia lebih berfokus pada pembangunan kawasan berkelanjutan yang cenderung terpusat di perkotaan, menyebabkan desa lebih terisolasi. Namun, perguruan tinggi di kedua negara tetap berkontribusi dalam perencanaan perumahan dan permukiman, menawarkan solusi praktis untuk pembangunan berkelanjutan di perdesaan.

Kata kunci: Perumahan dan Permukiman, Perdesaan, Perencanaan Pembangunan.

ABSTRACT

Rural housing and settlement management play a crucial role in sustainable development in countries like Malaysia and Indonesia. Each country adopts different policy approaches: Malaysia implements a structured top-down model, while Indonesia emphasizes a participatory approach. This community service initiative, a collaboration between the Islamic University of Riau and Universiti Sultan Zainal Abidin, aims to examine the role of universities in shaping rural housing and settlement policies. Discussions and experience-sharing sessions were conducted to compare university contributions to government initiatives. Findings reveal similarities in regional planning, particularly in land use and land function. However, Malaysia maintains a consistent focus on rural community growth, leading to more empowered villages. In contrast, Indonesia prioritizes sustainable regional development, often favoring urban areas and leaving villages relatively isolated. Despite these differences, universities in both countries contribute to rural housing and settlement planning by offering practical solutions for sustainable development.

Keywords: Housing and Settlement, Rural Areas, Development Planning.

PENDAHULUAN

Permukiman merupakan kebutuhan primer setiap warga negara dimana pemenuhan hak dasarnya menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan



permukiman yang layak, bersih dan sehat. Permukiman didefinisikan sebagai bagian dari kawasan permukiman yang terdiri dari lebih dari satu unit rumah dan memiliki prasarana, fasilitas umum, dan fitur pendukung di wilayah perkotaan dan pedesaan (Putri et al., 2021). Fungsi sosial dan ekonomi menjadi faktor dominan jika pemenuhan kebutuhan primer tersebut terpenuhi. Kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan berpengaruh terhadap masa depan setiap warga negara. Secara perlahan permukiman bergeser ke wilayah perkotaan sehingga persentase wilayah permukiman di pedesaan lambat laun ditinggalkan. Hal tersebut berdampak pada semakin berkurang lahan, harga tanah dan properti menjadi mahal akibat dari tingginya arus urbanisasi perkotaan. Pembangunan bertumpu pada wilayah perkotaan mengakibatkan pedesaan menjadi terisolasi dan tidak menjadi skala prioritas dalam derasnya arus modernisasi (Wijaya, Zanariah, et al., 2023). Perumahan swadaya dominan dibangun di lokasi yang mudah diakses, sedangkan perumahan formal dibangun di pinggiran kota, karena masyarakat miskin perkotaan bergantung pada pasar tenaga kerja informal di wilayah perkotaan pusat (Wu, 2016).

Konsentrasi penduduk di perkotaan menimbulkan permintaan yang tinggi terhadap perumahan dengan sektor konstruksi yang diperhitungkan sebagai sektor kunci yang berimplikasi pada keberlanjutan hunian (Tan et al., 2020). Belum lagi masalah mobilitas manusia di kota menjadi perhatian yang semakin meningkat dan berperan penting dalam kemacetan lalu lintas, polusi lingkungan, dan penyebaran penyakit. Dampak keseluruhan permukiman di pedesaan terhadap pembangunan pedesaan bersifat heterogen secara dimensional. Persoalan pemenuhan perumahan layak dan murah terdapat di semua negara, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju (Sutrisno et al., 2023). Perbandingan kebijakan perumahan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan pendekatan dan prioritas dalam menangani permasalahan perumahan (Wijaya, Wallang, et al., 2023).

Permukiman merupakan suatu lingkungan tempat tinggal yang lebih dari sekedar rumah atau perumahan yang di dalamnya terdapat kepentingan dan keselarasan pemanfaatan secara terpadu sebagai suatu lingkungan tempat tinggal (Yuliasuti & Fahrizal, 2019). Perumahan di pedesaan merupakan perwujudan gaya hidup, mata pencaharian, dan pada akhirnya kekuatan dan faktor yang mempengaruhi lingkungan dan tren sosial ekonomi. Dari hal tersebut, sifat produktif dan mata pencaharian merupakan salah satu ciri terpenting perumahan pedesaan di berbagai wilayah negara, yang efektif pada berbagai tingkat pembentukan permukiman.

Secara fundamental, optimalisasi mekanisme penataan ruang permukiman pedesaan bertujuan untuk melaksanakan strategi koordinasi pembangunan perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan kualitas permukiman yang merata, bukan bentuk permukiman yang sama antara pedesaan dan perkotaan (Wang et al., 2017). Perkotaan dan Pedesaan digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem di wilayah geografis tertentu; terdapat berbagai hubungan dan interaksi di antara keduanya seperti arus lalu lintas barang dan jasa khususnya sektor pertanian. Konsep keterjangkauan mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk membeli kebutuhan primer. Di masa lalu, hal ini sering didefinisikan sebagai rumah tangga yang menghabiskan kurang dari 30% pendapatan mereka untuk perumahan.

Pembangunan infrastruktur desa di Indonesia seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum dibangun melalui dana desa dan bantuan dari pemerintah daerah. Pembangunan ini sering kali melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan, di Malaysia, infrastruktur desa biasanya didukung oleh program pembangunan yang digagas oleh pemerintah pusat, seperti Program Transformasi Pedesaan (Rural Transformation Programme) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan membangun infrastruktur dan menyediakan layanan penting. Meskipun Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang berfokus pada pembangunan pedesaan, namun pendekatan Pembangunan yang digunakan berbeda. Indonesia cenderung memberikan desa lebih banyak otonomi dengan pendanaan pengelolaan lokal yang signifikan, sementara Malaysia mengandalkan program nasional terpadu untuk mengembangkan desa dengan dukungan yang lebih terpusat. Keterlibatan masyarakat di Indonesia lebih tinggi dalam proses pembangunan desa, sementara di Malaysia, keterlibatan masyarakat lebih terstruktur dan memiliki peran pemerintah yang dominan.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Perbandingan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan di Malaysia dan Indonesia diarahkan kepada mewujudkan ilmu pemerintahan yang unggul dan inovatif di bidang pemerintahan. Selain itu jika dikaitkan dengan fokus pengabdian yang tertera pada RIPPM UIR dimana kegiatan pengabdian ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan kebutuhan permukiman khususnya di wilayah perdesaan bahwa pentingnya inisiatif masyarakat dalam pemenuhan haknya sebagai warga negara serta pentingnya peran pembangunan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara atas perolehan permukiman yang layak di perdesaan.

METODE PELAKSANAAN

Lingkup kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa lingkup *sharing knowledge* perguruan tinggi antara Universitas Islam Riau dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA). Sasaran utamanya adalah eksistensi kontribusi perguruan tinggi terhadap kebijakan perumahan dan permukiman di wilayah perdesaan. Dalam tahap ini diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Malaysia khususnya khususnya keterlibatan Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) dalam perencanaan kebijakan perumahan dan permukiman perdesaan Terangganu Darul Iman dan Universitas Islam Riau. Kemudian, melakukan *sharing knowledge* sehingga dapat membantu pemecahan masalah saling mengadopsi keunggulan masing-masing negara dalam hal perencanaan kebijakan pengelolaan perumahan dan permukiman di perdesaan.

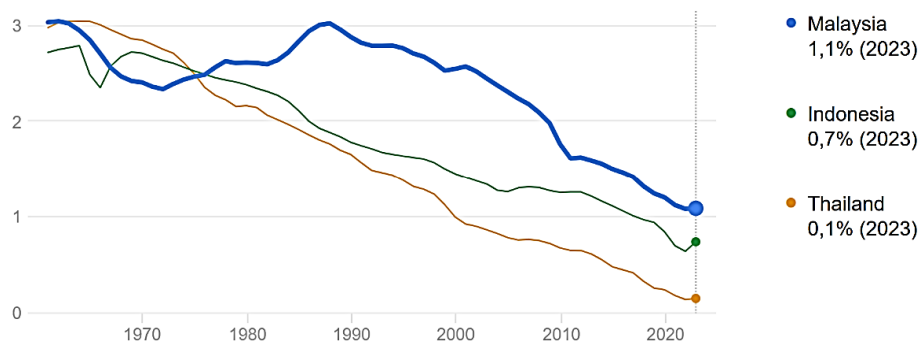
Tim pengabdian melakukan kegiatan diskusi dengan metode *lesson learn* pada setiap kontributor, memberikan komparasi dari berbagai pengalaman perguruan tinggi yang melibatkan pemerintah dalam perencanaan kebijakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat perdesaan dan penyampaian materi (ceramah) tentang pengelolaan infrastruktur desa.

HASIL KEGIATAN

Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Malaysia dan Indonesia

Masyarakat pedesaan sering dikaitkan dengan kemiskinan karena kurangnya kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan bagi penduduknya. Mereka juga terkait dengan kegiatan pertanian yang meliputi kegiatan bercocok tanam, peternakan, dan perikanan. Penduduk pedesaan sering dikaitkan dengan kurangnya pendidikan dan keterampilan. Sebagian besar kegiatan ekonomi di daerah pedesaan dilakukan dengan menggunakan metode tradisional. Selain itu, lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan perlu lebih luas dan lebih ekonomis untuk usaha bisnis.

Dalam perencanaan pembangunan perdesaan ada kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu dalam penataan kawasan berfokus kepada penggunaan lahan dan fungsi lahan. Sementara perbedaannya adalah Malaysia konsisten dalam Pembangunan dan pertumbuhan kemampuan masyarakat desa. Sehingga desa-desa di Malaysia lebih berdaya. Sedangkan di Indonesia lebih berfokus pada pengembangan Kawasan berkelanjutan. Sehingga titik tumpu pembangunan lebih cenderung ke kawasan perkotaan, sehingga desa masih jauh dari pembangunan bahkan relatif terisolasi.



Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan Populasi

Sumber : World Health Organization, 2024

Dengan model polarisasi perkotaan, maka implikasinya adalah tumbuhnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan berbagai macam resiko akibat dari padatnya permukiman dan terbatasnya lahan. Sementara Malaysia dapat mengatasi masalah permukiman kumuh dalam program Visi Malaysia Bebas Kumuh 2005 yang dilaksanakan sejak tahun 1998.

Luasnya bentang geografis serta banyaknya jumlah desa di Indonesia sehingga kecenderungan pembangunan wilayah tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan. Semakin padatnya wilayah perkotaan serta lahan yang terbatas, maka lambat laun orientasi pembangunan mulai bergeser ke wilayah perdesaan. Desa yang semula di dominasi oleh masyarakat petani mulai bergeser dan di isi masyarakat non pertanian. Sehingga dengan masih banyaknya lahan kosong maka banyak dibangun

perumahan (Anwar et al., 2022). Perencanaan pengembangan sistem perumahan desa di Indonesia merupakan suatu upaya dalam mengatur tata ruang wilayah desa agar memiliki ketersediaan lahan yang cukup untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat desa yang membutuhkan.

Tidak hanya di Indonesia, Malaysia juga memiliki hal yang sama dalam penataan Pembangunan. Kota-kota Melayu saat ini tengah mengalami perubahan yang luar biasa akibat pesatnya industrialisasi, pembangunan ekonomi, dan urbanisasi. Karakteristik asli kota-kota ini telah berubah akibat meningkatnya jumlah penduduk, migrasi, kekayaan ekonomi, dan perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh pembangunan skema perumahan modern, tempat usaha, dan infrastruktur lainnya (Sazali et al., 2020). Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan perubahan kebutuhan mereka telah diimbangi oleh perubahan lanskap perkotaan dan tingkat pembangunan di suatu wilayah, terutama wilayah yang dekat dengan pusat kota. Tanggung jawab antara masyarakat, tata kelola, dan pemerintah daerah merupakan faktor penting bagi kualitas hidup masyarakat perkotaan (Kamarudin et al., 2021).

Tabel 1. Perbandingan Perencanaan Pembangunan Permukiman di Malaysia dan Indonesia

Dimensi	Malaysia	Indonesia
Kebijakan	- Pengawasan dan pengendalian pemerintah yang kuat dalam perencanaan dan pengembangan permukiman. Adanya kebijakan perumahan yang terintegrasi, seperti Malaysia Plan yang mengarahkan pembangunan permukiman secara nasional. - Pemerintah menyediakan banyak skema perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti PR1MA (Perumahan Rakyat 1 Malaysia) dan PPR (Projek Perumahan Rakyat)	- Perencanaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah tidak maksimal. - Relatif sering terjadi karena perbedaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan dan Tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Perencanaan Tata Ruang	- Tata ruang permukiman lebih terencana dengan zoning yang ketat dan pembangunan kota satelit untuk mengurangi kepadatan di pusat kota, seperti Putrajaya dan Cyberjaya. - Memiliki sistem transportasi yang mendukung permukiman berbasis TOD (<i>Transit Oriented Development</i>) untuk mengurangi kemacetan.	- Banyak kota masih menghadapi tantangan dalam perencanaan tata ruang, dengan perkembangan permukiman yang cenderung kurang terkendali. - Penyebaran permukiman tidak merata, dengan banyak daerah perkotaan yang mengalami over-urbanisasi,

Sumber : Data olahan dari berbagai sumber

Salah satu indikator kekumuhan yaitu masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar perkotaan (jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase). Diprediksikan bahwa 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2053, hal ini berpotensi bertambahnya luas kawasan kumuh perkotaan jika tidak ada kebijakan yang tepat sasaran.

Tabel 2. Perbandingan Perencanaan Pembangunan Permukiman Kawasan Pedesaan di Malaysia dan Indonesia

Dimensi	Malaysia	Indonesia
Kebijakan	- Pemerintah Malaysia memiliki program pembangunan desa yang terencana dengan baik melalui Dasar Pembangunan Desa Nasional (<i>National Rural Development Policy</i>). - Salah satu contoh program tersebut adalah FELDA (<i>Federal Land Development Authority</i>): Fokus pada pembangunan permukiman dan kesejahteraan petani di daerah pedesaan.	- Pembangunan permukiman di desa dikelola melalui berbagai program seperti Program Dana Desa, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan dan jalan desa. - Salah satu program adalah PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan): Memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan desa dan jembatan
Perencanaan Tata Ruang	- Desa di Malaysia umumnya lebih terstruktur dengan pola pemukiman yang cenderung tersentralisasi. - Infrastruktur jalan dan konektivitas desa-ke-kota lebih baik, mendukung mobilitas penduduk desa untuk bekerja di kota tanpa harus pindah	- Pola permukiman lebih tersebar dan berkembang secara alami, tergantung pada kondisi geografis dan budaya lokal. - Masih banyak desa yang mengalami kesulitan akses, terutama di daerah terpencil atau terisolasi.

*Sumber : Data olahan dari berbagai sumber

Upaya untuk mengimbangi ketidakseimbangan perkotaan dan pedesaan terus berlanjut sehingga tujuan akhir untuk memberantas kemiskinan di kalangan orang Melayu telah berkembang pesat (Abdullah et al., 2022). Pembangunan sosial ekonomi dan fasilitas fisik secara bertahap tersebar di seluruh negeri Malaysia, baik di kota-kota industri baru, di dalam kota, atau di daerah yang secara khusus dikembangkan untuk masyarakat pedesaan dan pinggiran kota.

Pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun Malaysia yang disusun oleh kementerian dan institusi pemerintah telah memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi negara tersebut melalui pelaksanaan berbagai program dan proyek yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mengeluarkan mereka dari perangkat kemiskinan (Latiff et al., 2023). Namun, angka kemiskinan di Malaysia masih tinggi yaitu 5,5% pada tahun 2019.

Kebijakan Pembangunan Pedesaan Malaysia menunjukkan bahwa visi utama pembangunan daerah pedesaan adalah menuju “daerah pedesaan yang sejahtera, inklusif, dan holistik.” Permukiman pedesaan di Malaysia dapat didefinisikan sebagai permukiman yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 10.000 orang dan mayoritas penduduknya terlibat dalam sektor pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama mereka (Hanapiah et al., 2022). Kebijakan perumahan Malaysia sejalan dengan agenda pemerintah, termasuk kebijakan yang telah ditegaskan sebelumnya, yaitu pemerintah ingin menyediakan “tempat tinggal yang layak untuk semua”. Visi kebijakan perumahan Malaysia adalah untuk memastikan bahwa semua penduduk sipil, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah, memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kawasan Pedesaan di Malaysia dan Indonesia

Sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, desa harus mendapat perhatian dalam pembangunan sehingga tidak terkesan entitas yang terisolasi (Salouw & Widodo Dwi Pramono, 2023) serta pedesaan menjadi terabaikan dan melebarnya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dengan pesatnya perkembangan produktivitas dan urbanisasi (Qu et al., 2024). Meskipun pembangunan komunitas pedesaan baru terkait erat dengan struktur dan permintaan fungsional rumah tangga pedesaan (Su et al., 2019) yang berorientasi pada rumah tinggal sekaligus menjadi tempat produksi pertanian. Tanah merupakan sumber kekayaan, fondasi pertanian, dan akar penghidupan petani. Sebagai tatanan hubungan produksi yang paling penting di suatu negara, sistem pertanian juga merupakan sistem yang paling mendasar.

Perguruan tinggi di Malaysia dan Indonesia memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pembangunan perumahan berbasis data dan teknologi. Universitas menyediakan analisis berbasis data melalui penelitian akademik yang mendalam, seperti pemetaan kebutuhan perumahan dan simulasi implikasi kebijakan. Data ini kemudian digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terstruktur terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian, perguruan tinggi juga melakukan pengembangan inovasi teknologi konstruksi, dalam mendukung *eco-green* dan *green housing* yang dapat diadopsi oleh berbagai sektor.



Gambar 2. Aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia

Konsep *triple helix* yang menekankan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan developer menjadi landasan fundamental dalam memahami peran perguruan tinggi dalam pembangunan perumahan. Universitas tidak hanya berfungsi sebagai penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai penghubung yang menjembatani kebutuhan pemerintah dan industri melalui *research and development*. Di Malaysia dan Indonesia, kolaborasi lintas sektor ini semakin relevan dalam menghadapi tantangan perumahan, seperti kebutuhan akan material berbasis ramah lingkungan, efisiensi konstruksi, dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyediaan rumah untuk masyarakat pedesaan merupakan tantangan penting yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, Pemerintah menyediakan subsidi untuk pembangunan melalui program-program pemerintah kepada masyarakat untuk memiliki rumah. Di daerah pedesaan, program ini difokuskan pada pembangunan rumah-rumah sederhana yang sesuai dengan kondisi lokal. Pengembangan perumahan di desa seringkali melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Program Rumah Swadaya mendorong masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka dengan bantuan material dan teknis dari pemerintah. Sedangkan di Malaysia, Malaysia memiliki program seperti Projek Perumahan Rakyat (PPR) yang menyediakan rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program SPNB (Syarikat Perumahan Negara Berhad) juga berperan dalam pembangunan perumahan di daerah pedesaan. Di Malaysia, program Desa Lestari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perumahan dan infrastruktur yang berkelanjutan..

Hasil *sharing* antara Universitas Islam Riau dan Universiti Sultan Zainal Abidin menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi di Malaysia dan Indonesia memainkan peran penting dalam perencanaan perumahan melalui kontribusi mereka yang inovatif. Perguruan tinggi bertindak sebagai pusat penelitian dan menyediakan analisis mendalam, seperti simulasi dampak kebijakan dan pemetaan kebutuhan perumahan, untuk membantu pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih fleksibel dan efektif. Lebih jauh lagi, dengan mengembangkan teknologi konstruksi yang ramah lingkungan dan efisien, perguruan tinggi di Malaysia dan Indonesia juga memberikan kontribusi bagi perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta memberikan jawaban praktis bagi keberlanjutan pembangunan perumahan dan permukiman di pedesaan. Untuk kedepannya disarankan kerjasama lintas negara antara Universitas Islam Riau dan Universiti Sultan Zainal Abidin dapat memfasilitasi kemajuan teknologi dan penyebaran pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan regional. Kerja sama ini tidak hanya akan mempercepat pengenalan inovasi tetapi juga meningkatkan prospek pengembangan kebijakan perumahan komprehensif yang mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi kedua negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Faculty of Applied Social Sciences Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu Malaysia sebagai mitra yang telah memfasilitasi untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional, serta Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Wahid, J., Abdulkarem Al-Ansi, N., & Mohd Ariffin, E. N. E. (2022). The Malay Settlement: A vanishing world? *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(20), 87–92. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i20.2967>
- Anwar, K., Wahyu, W., & Arisanty, D. (2022). Pembangunan Perumahan di Desa Semangat Dalam dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Masyarakat. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 9(1), 28–39. <https://doi.org/10.20527/jpg.v9i1.12697>
- Hanapih, T. M., Samsudin, N. A., & Farid, M. (2022). IMPACTS OF INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT (IRD) TOWARDS TRADITIONAL VILLAGE ECONOMY IN KETENGAH, TERENGGANU,. *PLANNING MALAYSIA: Journal of the Malaysian Institute of Planners*, 20(4), 210–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.21837/pm.v20i23.1162>
- Kamarudin, M. K. A., Rahman, L. A., Mohamad, M., Amin, W. A. A. W. M., Wahab, N. A., Toriman, M. E., Umar, R., & Bati, S. N. A. M. (2021). The Development of Urban Quality of Life Spatial Model Using Geographic Information System (GIS) in Kuala Terengganu, Malaysia. *ASM Science Journal*, 15(2012), 1–10. <https://doi.org/10.32802/ASMSCJ.2020.410>
- Latiff, A. M. A., Jaapar, A., & Isa, C. M. M. (2023). Factors Contribute to Project Governance Practices: Case Studies in Malaysian Rural Poverty Housing Projects. *International Journal of Rural Management*, 19(1), 113–129. <https://doi.org/10.1177/09730052211059890>
- Putri, K., Hargianintya, A., Hasibuan, H. S., & Sundara, D. M. (2021). Housing profile: Analysing human settlement in fisheries village coastal area, North Jakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012132>
- Qu, L., Wang, J., & Li, Y. (2024). Housing-industry transformation development and rural revitalization path based on complex adaptive system in Three Gorges Reservoir Area of China. *Ecological Indicators*, 162(January), 112008. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112008>
- Salouw, E., & Widodo Dwi Pramono, R. (2023). Typology of Tourism Village Settlement in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 295–304. <https://doi.org/10.22500/10202241282>
- Sazali, A. S., Hasan, A. S., Arab, Y., & Witchayangkoon, B. (2020). Legibility Pattern At A City Center Of Kuala Terengganu, Malaysia. *International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies*, 11(12), 1–13.

<https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2020.213>

- Su, K., Hu, B., Shi, K., Zhang, Z., & Yang, Q. (2019). The structural and functional evolution of rural homesteads in mountainous areas: A case study of Sujiaying village in Yunnan province, China. *Land Use Policy*, 88(July), 104100. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104100>
- Sutrisno, Asmal, I. J., Radja, A. M., & Yahya, M. (2023). The Problem of Cheap Housing Development for Low-Income Communities in Urban; Transformation of the Transitional Space and Review for Further Research Positions. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2), 1–30. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.556>
- Tan, H. Y. Q., Lim, P. I., & AbdulLateef, O. (2020). Sustainability of Affordable Housing: A Review of Assessment Tools. *International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Science & Technologies*, 11(8), 1–10. <https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2020.157>
- Wang, J., Zhao, J., Wu, T., & Li, J. (2017). A Co-Evolution Model of Planning Space and Self-Built Space for Compact Settlements in Rural China. *Nexus Network Journal*, 19(2), 473–501. <https://doi.org/10.1007/s00004-017-0334-z>
- Wijaya, M., Wallang, M., & Prihatin, P. S. (2023). Lesson Learn Pengelolaan Sektor Infrastruktur Perumahan di Kawasan Perbatasan Indonesia dan Malaysia. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 1856–1869. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3485>
- Wijaya, M., Zanariah, Rosalin, N., Yulina, I. K., Dinihari, T. R., Purba, T. P., Ernamayanti, & Saragih, J. (2023). *Dinamika Kebijakan dan Praktik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Madza Publishing.
- Wu, F. (2016). Housing in Chinese Urban Villages: The Dwellers, Conditions and Tenancy Informality. *Housing Studies*, 31(7), 852–870. <https://doi.org/10.1080/02673037.2016.1150429>
- Yuliastuti, N., & Fahrizal. (2019). Spatial Planning and Community Involvement of Ecovillage Settlements in Tibang Village, Banda Aceh City. *Jurnal Geografi*, 16(2), 97–104. <https://doi.org/10.15294/jg.v16i2.21607>